

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRO-POOR TOURISM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KOMUNITAS MASYARAKAT HAD BAI, THAILAND UTARA

I Putu Sindhu Andredita¹), Putu Ratih Kumala Dewi²), Putu Titah Kawitri Resen³)

¹²³)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: sindhuandredita@gmail.com¹, ratihkumaladw@unud.ac.id², titahkawitri@unud.ac.id³

ABSTRACT

Tourism is one major source of income in term increasing benefit and opportunity for the poor, it will perpetually closed the gap between rich and poor in long period. This research will focus on the efforts of Thailand government in regard implement Pro-Poor Tourism. This policy has significant role regarding generate the revenue amongst the poor community in Thailand. However, during the process this policy has impacted only the upper and middle class in Thailand society, this in turn resulted a question about how should the decision maker in Thailand improved their tourism policy in terms to gain equal benefit amongst Thailand poor people and maximize their resources. Thailand government expects that the policy will unlock broader acces for the community to get direct involvement in tourism sector. Had - Bai is one of the village that selected to be the pilot project of Pro-Poor Tourism, hence, Thailand government's strategy to evolve the village also as respond to the 1997 economic crisis. By implement intensively Pro-Poor Tourism through One Tambon One Product (OTOP) project policy, the brand new chapter of tourism agenda in Thailand has started

Key words: *Pro-Poor Tourism, One Tambon One Product (OTOP), Local community resources.*

1. PENDAHULUAN

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian di Thailand selain sektor agraris. Di Asia Tenggara, Thailand dikenal sebagai destinasi wisata yang cukup mumpuni diantara negara berkembang lainnya (Chheang, 2013). Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari rezim pemerintah Thailand yang memiliki peranan signifikan dalam mendorong terwujudnya iklim industri pariwisata.

Peran pemerintah tersebut tercermin melalui alokasi anggaran dan upaya pemberdayaan masyarakat yang berpijak pada prinsip *Sufficiency Economy*.

Diadopsinya prinsip *Sufficiency Economy* oleh pemerintah Thailand ditujukan untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Krisis ekonomi Asia merupakan fenomena yang mengakibatkan ambruknya tatanan ekonomi di negara Asia, khususnya Thailand. Situasi yang lebih terpuruk terjadi di wilayah Had Bai, Thailand Utara. Sekitar 61% masyarakat diwilayah tersebut hidup di garis *absolute poverty* atau berpenghasilan kurang dari 1,386 Baht (\$42) per orang setiap bulannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Thailand berupaya mengambil strategi kebijakan dalam rangka

menyelamatkan roda ekonomi negara melalui insentif devisa dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

Maka pada tahun 2000 sampai 2006 pemerintah Thailand mengupayakan langkah kebijakan *economy recovery*. Kebijakan *economy recovery* ditandai dengan diimplementasikannya kebijakan *Pro - Poor Tourism*. Sejak diimplementasikannya kebijakan *Pro - Poor Tourism* yang dimulai pada tahun 2001 di wilayah Had Bai hingga tahun 2006, implementasi kebijakan *Pro - Poor Tourism* telah memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan sektor pendapatan riil masyarakat Had Bai, yang kini juga berasal dari sektor pariwisata selain pertanian. Perkembangan sektor pariwisata di wilayah Had Bai juga berimbas pada sektor pendapatan riil masyarakat komunitas di wilayah tersebut.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pada sub-bab ini akan dijabarkan beberapa literatur yang sekiranya berkaitan dengan penelitian mengenai implementasi kebijakan *pro-poor tourism*. Adapun literatur Literatur yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh David Peaty dan Antia Portillo (2009) yang berjudul *Community - Based Tourism in Bolivia : Projects and Perspectives*.

Penelitian tersebut membahas mengenai peranan pemerintah Bolivia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dengan melaksanakan program pariwisata berbasis komunitas (*community - based tourism*). Secara substansi penelitian yang dilakukan oleh David Peaty dan Antia

Portillo memberikan kontribusi berupa kerangka konseptual *community based tourism*. *Community based tourism* bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat negara melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan mengacu pada logika pembangunan yang berpihak pada kelas menengah kebawah.

Literatur selanjutnya berupa penelitian yang dilakukan oleh Kenneth Wood (2005) yang berjudul *Pro-Poor Tourism as A Means of Sustainable Development in The Uctubamba Valley, Northern Peru* Penelitian Wood melihat bahwa aspek pelibatan komunitas lokal adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkan distribusi keadilan yang merata dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan bantuan insentif dana, akses pada pendidikan, akselerasi pelatihan keterampilan bagi masyarakat Kuelap.

Adapun dari kontribusi penelitian tersebut dalam memperkaya pemahaman konsep dengan menitikberatkan pada wilayah pelibatan masyarakat komunitas lembah Uctumbamba, Peru. Indikator kemiskinan yang menjadi akar persoalan di wilayah tersebut serta dampak kebijakan yang bersifat periodik akan memperjelas penelitian penulis terhadap bagaimana evaluasi program kebijakan *Pro - Poor Tourism* yang diterapkan di wilayah Had Bay, Thailand Utara.

Literatur yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Naomi Saville (2001) yang berjudul *Practical Strategies For Pro-Poor Tourism : Case Study of Pro-Poor Tourism and SNV in Humla District, West Nepal*. Secara umum penelitian ini membahas tentang bagaimana proses kerjasama yang

berlangsung antara pemerintah Nepal, dalam hal ini Distrik Humla dengan SNV (Netherlands Development Organisation) melalui program yang disebut dengan *The District Partners Programme* (DPP). Adapun kontribusi penelitian Naomi terhadap implementasi dari kebijakan *Pro-Poor Tourism* pada penelitian ini terletak pada beberapa mekanisme langkah strategis, yaitu empat fase serta sepuluh langkah SNV yang berkolaborasi dengan masyarakat komunitas Humla. Fase tersebut antara lain ;pertama, fase identifikasi, kedua fase *feasibility study*, ketiga *district level, village level and business planning*, dan keempat, *monitoring and evaluation*.

Di penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Pro-Poor Tourism* dalam menganalisa bagaimana penerapan kebijakan pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Thailand utara, pasca keterpurukan ekonomi pada tahun 1997.

a. PRO – POOR TOURISM

Pro -Poor Tourism didefinisikan sebagai pendekatan terhadap industri pariwisata yang menjamin adanya jaringan keuntungan dari industri pariwisata terhadap yang miskin atau *Poor*. *Pro-Poor Tourism* digunakan oleh negara berkembang sebagai alat untuk perbaikan ekonomi masyarakat, secara umum konsep tersebut menghasilkan rangkaian jaringan yang saling terhubung di sektor industri pariwisata, hal tersebut akan berdampak pada lahirnya inisiatif bagi warga lokal, masyarakat adat, komunitas desa untuk mengaktifkan sumber daya yang dimiliki, memanfaatkan potensi daerah dan akhirnya menjadi subsistem penunjang bagi roda industri pariwisata (Srisantisuk,2015).

Pro-Poor Tourism menekankan perhatian pada dampak industri pariwisata yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, dengan mengedepankan partisipasi aktif komunitas yang ada dalam sebuah negara. Sekaligus sebagai strategi untuk menempatkan ekonomi masyarakat miskin sebagai agenda prioritas pembangunan.

Adapun menurut (Ashley, 2001) mengidentifikasi enam prinsip dari konsep *Pro-Poor Tourism*, antara lain :

1. Partisipasi : masyarakat miskin harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, berkenanan dengan pariwisata, apabila prioritas mereka adalah keberlangsungan kehidupan yang tercermin dari pelibatan dalam industri wisata,
2. *Commercial realism* : komitmen bersama dalam mempercepat pengurangan hambatan pada masyarakat miskin melalui ketersediaan produk yang dibutuhkan dalam industri pariwisata yang mampu dikomersilkan,
3. *Holistic livelihoods approach* : perhatian pada keberlangsungan hidup masyarakat pada derajat tertentu baik dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dalam aspek jangka panjang maupun jangka pendek.
4. Fleksibilitas :penerapan skala pembangunan yang dapat diadaptasikan.
5. Distribusi : dorongan aksi kolektif demi terwujudnya konsep pariwisata yang mampu mendistribusikan keuntungan

secara merata maupun pendanaan yang adil.

6. Pembelajaran : konsep *Pro-Poor Tourism* diadaptasikan dari analisa konsep yang sudah pernah diterapkan dan tetap berupaya diperbaharui sesuai dengan kontekstual definisi kemiskinan yang berkembang.

Menurut Spenceley (2003,hal:48) pendekatan *Pro-Poor Tourism* mencakup empat area potensial yang mana dapat memacu industri pariwisata dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;

- 1) Pariwisata merupakan industri yang relatif beragam, memberikan akses dalam ruang lingkup partisipasi bagi komunitas dapat memperluas area industri pariwisata hingga menyentuh sektor informal
- 2) Industri pariwisata merupakan sektor yang mampu berkitan dengan pengembangan industri cinderamata
- 3) Industri pariwisata menyediakan peluang yang lebih untuk aset masyarakat miskin, semisal lahan, tanah, adat istiadat, */natural capital* untuk terintegrasi dengan akses terhadap pariwisata global.
- 4) Industri pariwisata melalui pendekatan *labor intensive* mmungkinkan mampu mendatangkan keuntungan dari pada sektor industri manufaktur.

Menurut Ashley (2001) implementasi *Pro-Poor Tourism* di tingkat lokal konsep tersebut dapat memainkan peran yang signifikan dalam aspek keberlangsungan kehidupan dan pengurangan kemiskinan, strategi *Pro-Poor Tourism* dapat dikategorikasikan menjadi tiga tipe yaitu :

- 1) Strategi *Pro-Poor Tourism* yang fokus kepada manfaat ekonomi melalui peluang integrasi tenaga kerja kedalam sektor pariwisata, peningkatan upah tenaga kerja lokal, serta ekspansi peluang bisnis kepada golongan miskin dengan mengakomodir kebudayaan setempat.
- 2) Strategi *Pro-Poor Tourism* dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan kapasitas keterampilan, disamping perbaikan infrastruktur, akses transportasi, perbaikan sarana kesehatan, akses air bersih serta sanitasi.
- 3) Strategi yang mengambil fokus pada proses pembuatan keputusan dan *framework* yang membuka akses masyarakat lokal berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan sebagaimana juga di arena *partnership* di sektor privat. (Ashley, 2001)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang digambarkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mencoba menjelaskan situasi sosial yang ada dengan mendeskripsikan realita yang ada dengan sebenar-benarnya, disusun dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang saling berhubungan dari situasi yang alamiah (Satori,&Komariah, 2013).

Sumber data penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Hal ini dikarenakan sumber data yang didapatkan tidak langsung berasal dari informan tetapi dengan

menggunakan studi kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan penulis sebagai sumber data antara lain : Buku yang berjudul *pro-poor tourism policy in Thailand* ditulis oleh SomparatSrisantisuk pada tahun 2015, *tourism and regional integration in south east Asia* ditulis oleh Vanarith Chheang, tahun 2013.

Data lainnya berupa jurnal ilmiah, diantaranya : jurnal yang berjudul *pro-poor tourism as a means of Sustainable projects and perspectives* yang ditulis oleh Kenneth Wood pada tahun 2005, *community-based tourism in Bolivia: development in the Uctubamba valley, Northern Peru* yang ditulis oleh David Peaty dan Antia Portillo pada tahun 2009, dan yang terakhir berjudul *practical strategies for Pro-Poor Tourism : case study of Pro-Poor Tourism and SNV in Humla District, West Nepal* yang ditulis oleh Naomi Saville pada tahun 2001.

Unit analisa dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan *Pro-Poor Tourism* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Had Bai, Thailand Utara. Sementara tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok individu yaitu komunitas masyarakat Had Bai.

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan metode yang lebih sistematis serta menguraikan permasalahan yang dikaji dengan membaginya menjadi bagian-bagian atau sub-bab. Sehingga susunan yang diurai dapat dengan jelas dipahami maknanya, tentu dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan penelitian yang penulis hendak analisa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi bagi roda perekonomian nasional suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pariwisata adalah sumber utama penghasil devisa serta pendukung keseluruhan pertumbuhan ekonomi. Pariwisata di Thailand adalah sektor yang memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi bagi roda perekonomian nasional, keberadaan industri pariwisata berkembang secara pesat seiring dengan fokus pemerintah Thailand yang memproyeksikan arah pembangunan nasional berbasiskan sektor pariwisata. Keinginan pemerintah Thailand dalam mengadopsi kerangka kebijakan pariwisata tercermin kedalam kerangka pembangunan nasional atau yang disebut dengan *The National Economic & Social Development Plan*.

Selama prosesnya implementasi kebijakan pembangunan pemerintah Thailand mengadopsi prinsip *Sufficiency Economy*, suatu prinsip dalam tata kelola perekonomian yang dicetuskan oleh Yang Mulia Raja (*His Majesty King*) Bhumipol sebagai landasan filosofi pembangunan nasional kearah pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Prinsip *Sufficiency Economy* memberikan gambaran orientasi pembangunan yang mengedepankan pemerataan, partisipasi masyarakat dan kemandirian di semua provinsi Thailand (Suindramedhi, 2015).

a. Wilayah Had-Bai Thailand Utara

Thailand Utara merupakan salah satu wilayah di Thailand yang memiliki luas sekitar 169.900 km² dengan jumlah polulasi penduduk yaitu 17.8 persen dari total seluruh

masyarakat Thailand. Pada perkembangannya formulasi kebijakan pemerintah Thailand yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi pasca krisis, belum dirasakan pada wilayah Thailand Utara. Hal tersebut mengakibatkan adanya *economic downturn* yang sangat buruk di wilayah tersebut. Etnis lokal *Tai Lue* di desa Had-Bai dipilih sebagai objek kebijakan *Pro Poor Tourism* karena memiliki tradisi dan adat yang unik disamping keindahan alam. Adapun sasaran komunitas dari kebijakan *pro - poor tourism* disini adalah kelompok penenun wanita etnis lokal *Tai-Lue* Had-Bai dengan komoditi kain tenun *Thai-Lue*. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal gambaran umum, bahwa *Tai Lue* merupakan kelompok etnis minoritas yang bermukim di desa Had-Bai dan menjadi penduduk lokal (*local inhabitant*) di desa Had-Bai.

Pada tahun 1993 sejumlah dua belas anggota kelompok penenun wanita *Tai Lue* diundang untuk mengikuti pelatihan manajemen keorganisasian, kewirausahaan, pelatihan *hospitality* pelayanan jasa pariwisata serta beragam pelatihan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelompok penenun wanita. Bersamaan dengan dilakukannya proses pelatihan bagi anggota kelompok penenun wanita tersebut, komite *Community Development Office* distrik Chiang Khong meresmikan lembaga keuangan mikro sebagai sarana penunjang modal investasi bagi kelompok penenun *Tai Lue*. Dengan demikian segenap penunjang dasar bagi proses operasional kegiatan usaha kelompok penenun tidak terhambat oleh hal vital seperti modal dan aset manufaktur.

Pada tahun 1997 kelompok penenun wanita *Tai-Lue* memperoleh dukungan juga dari Departemen pembangunan komunitas atau *Community Development Office of Chiang Khong* dalam bentuk penyediaan bangunan aktifitas produksi. Disamping itu pada tahun 1998 kantor pertanian distrik Chiang Khong juga memberikan bantuan berupa anggaran pembelian bahan baku produksi pembuatan kain tenun *Thai Lue* sebesar 100.000 Baht. Bentuk dukungan oleh pemerintah nasional Thailand tersebut mendorong kelompok penenun memperoleh akses kedalam pameran, festival promosi komoditas lokal Thailand Utara. Hal tersebut berdampak pada semakin mandirinya kelompok penenun dalam rangka memproduksi produk – produk lain yang memiliki daya jual yang potensial khususnya pada pangsa pasar domestik Thailand.

b. Implementasi Pro-Poor Tourism Di Had Bai Thailand Utara

Dalam proses implementasi kebijakan *pro-poor tourism* terdapat beberapa komponen yang digunakan sebagai pendekatan dalam menerapkan konsep *pro-poor tourism*.

Menurut Caroline Ashley (2001) implementasi dari konsep *pro-poor tourism* harus memberikan indikator tertentu dalam membedah permasalahan kemiskinan disuatu daerah melalui industri pariwisata dengan mengedepankan prinsip-prinsip yaitu *participation, commercial realism, holistic livelihoods approach, flexibility, distribution dan education*. Keenam prinsip yang dikemukakan oleh Ashley memberikan kontribusi terhadap kerangka implementasi *pro-poor tourism* oleh pemerintah Thailand. Adapun implementasi PPT tersebut

diejawantahkan kedalam program yang dinamakan *One Tambon One Product (OTOP)*.

Program *One Tambon One Product (OTOP)* dimulai pada bulan Mei Tahun 2001. Tujuan dari implementasi program OTOP tersebut adalah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, memaksimalkan serapan tenaga kerja, meningkatkan peluang pendapatan dan membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan/rural area. Dibawah program OTOP, masyarakat khususnya, elemen komunitas di wilayah pedesaan didorong untuk mampu mengadakan kegiatan produksi yang diperoleh dari sumber daya alam maupun kekhususan bentang alam, kerajinan, kebudayaan lokal setempat yang mampu menstimulus kegiatan ekonomi komunitas lokal.

Program OTOP sendiri memfokuskan pada keunikan yang dimiliki dalam suatu wilayah yang dinamakan *Tambon*, istilah untuk menyebut unit dalam lingkup paling kecil wilayah pedesaan atau lingkungan tempat komunitas tertentu dalam melangsungkan kehidupan. Pemerintahan Thaksin atau yang disebut *Thai Rak Thai (TRT)* melihat adanya potensi yang dimiliki pada masing-masing *Tambon* sebagai langkah mempromosikan pembangunan ekonomi di wilayah miskin dalam kurun waktu jangka panjang. Hal tersebut dibuktikan dengan dimasukkannya ide dasar dari program OTOP kedalam rencana pembangunan pariwisata nasional Thailand yang kesembilan, hal tersebut menegaskan komitmen pemerintahan Thaksin untuk membangun perekonomian nasional melalui segala bentuk

keunikan lokal yang diintegrasikan dalam rantai industri kegiatan pariwisata.

Secara garis besar program OTOP terdiri dari *National OTOP Committee*, *Provincial OTOP Sub-Committee* dan *District OTOP Sub-Committee*, adapun masing – masing bagan kelembagaan struktur tersebut bertanggung jawab dan dibawah oleh *Ministry of Interior* atau Kementrian Dalam Negeri Pemerintah Thailand. Program OTOP diimplementasikan kedalam tiga level wilayah administratif yang pertama, *OTOP Office* dan *National OTOP Administrative Committee* memiliki fungsi sebagai pihak yang memberikan garis standar, perencanaan strategi dan memberikan segala informasi yang berkaitan dengan terwujudnya partisipasi dari komunitas warga tiap *Tambon* di Thailand dalam kebijakan program OTOP.

Sementara dalam ruang lingkup daerah atau regional *District Committee* dan *Provincial Committee* secara langsung dipimpin oleh gubernur setempat yang memiliki otoritas dalam mensinkronkan segala keperluan serta kebutuhan dalam rangka *funding*, alokasi anggaran dan pengembangan kualitas produk OTOP di masing-masing distrik maupun *Tambon* (Kurokawa, 2010).

Implementasi konsep *pro-poor tourism* kedalam program OTOP tersebut berpegang pada prinsip *pro-poor tourism* yang dikemukakan oleh Caroline Ahsley, antara lain ;

- **Partisipasi**

prinsip partisipasi dalam program *pro-poor tourism* di Had Bai tersebut mengharapkan adanya partisipasi secara optimal pada

seluruh elemen komunitas masyarakat miskin. Partisipasi diwujudkan melalui adanya pembuatan keputusan berkenaan dengan pariwisata, prioritas komunitas dalam prinsip ini adalah adanya akses yang diberikan oleh pemerintah bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat miskin tercermin dari pelibatan di dalam rantai industri pariwisata. komunitas penduduk *Tai Lue* merupakan mayoritas warga di desa Had-Bai dengan komoditas tenun lokal *Thai lue* sebagai produk kerajinannya..

Sebanyak empat puluh rumah tangga anggota komunitas lokal Had Bai berpartisipasi dalam program OTOP. kelompok penenun wanita *Thai Lue* berumur 51 keatas sehingga memiliki keahlian menenun serta pengalaman dalam membuat motif tenun yang beraneka ragam. Sebagai hasilnya rata-rata penghasilan perbulan bagi kelompok penenun tersebut berkisar antara 3,600 Baht dengan tambahan 500-1000 Baht dari adanya program OTOP tersebut.

- **Commercial Realism**

Commercial realism diartikan sebagai adanya ketersediaan produk yang semakin variatif dan mampu menjangkau konsumen baik dalam maupun luar negeri. Sebagai prinsip dalam kebijakan *pro-poor tourism* ketersediaan tersebut hanya mampu diwujudkan apabila terdapat komitmen bersama dalam mempercepat pengurangan hambatan pada komunitas wilayah miskin melalui ketersediaan anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan industri pariwisata lokal. Dalam rangka mempercepat pengurangan hambatan bagi komunitas lokal, pemerintah Thailand melalui skema program OTOP mengeksekusi program bantuan dana

yang dikenal dengan nama *Thailand's One Million One Village Fund* atau yang lebih umum disebut *Village Fund Program*. *Village Fund Programe* mendistribusikan sebesar satu juta Baht (US \$24.000) kepada masing-masing 78.000 desa sejak tahun 2001 atau sekitar 99.1 persen wilayah pedesaan diseluruh Thailand. Program tersebut tergolong sebagai strategi program yang kontroversial dan ambisius di dalam sejarah pembangunan ekonomi Thailand. (Tangpianpant,2010)

- **Holistic Livelihood Approach**

Prinsip *holistic livelihood approach* dalam *pro-poor tourism* adalah perhatian pada keberlangsungan hidup masyarakat pada derajat tertentu baik dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dalam aspek jangka panjang maupun jangka pendek. pemerintah menekankan agar masyarakat komunitas lokal Had-Bai menyesuaikan diri secara efisien untuk mendapatkan manfaat terbaik dari program tersebut. Dalam rangka menjaga lokalitas ,tradisi kebudayaan komunitas Had-Bai, kelompok penenu wanita *Thai-Lue* mengupayakan langkah-langkah antara lain, memfokuskan aktifitas produksi komoditas kain jenis *Tai-lue* dengan tidak menggunakan bahan kimia yang berakibat pada pencemaran lingkungan aliran sungai mekong.

Disisi lain, meskipun proyek OTOP telah memberikan harapan adanya peluang peningkatan perekonomian bagi warga komunitas, *village committee* menyatakan bahwa masyarakat *Tai Lue* tidak lantas meninggalkan aktifitas mereka yang sebelumnya berprofesi di sektor pertanian.

- **Fleksibilitas**

Prinsip fleksibilitas disini mengandung pengertian bahwa proses penerapan kebijakan *pro-poor tourism* harus memberikan dampak bagi pembangunan secara fisik wilayah yang dipilih sebagai cakupan area implementasi kebijakan *pro-poor tourism*. Prinsip fleksibilitas berarti bahwa segala bentuk penerapan kebijakan harus berpijak kepada skala pembangunan yang diadaptasikan dengan tingkat kebutuhan vital komunitas, akses transportasi yang memadai dan fasilitas pemerintahan lainnya yang menunjang kegiatan produksi seluruh anggota komunitas.

Pemerintah Thailand menyadari bahwa kebijakan OTOP tidak akan mampu berjalan apabila persoalan infrastruktur tidak dijadikan prioritas. Penyediaan infrastruktur bagi berlangsungnya kegiatan produksi kelompok komunitas tenun wanita *Tai-Lue* dilakukan sering sejalan dengan semakin besarnya skala produksi kain tenun jenis *Thai-Lue*. Adapun pihak dari *village committee* memandang bahwa dengan aktifitas produksi yang semakin besar dikhawatirkan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan permasalahan sampah bagi desa. Maka demi mengatasi hal tersebut, pemerintah dengan koordinasi ketua kelompok tenun wanita beserta *village committee* dihibahkan bantuan berupa truk sampah, perbaikan *rail road*, tempat sampah dan penampungan air limbah tekstil (Srisantisuk, 2015).

- **Distribusi**

Dorongan aksi kolektif demi terwujudnya aktifitas industri pariwisata berbasis keunikan lokal yang mampu mendistribusikan keuntungan kepada masyarakat komunitas dan memberikan dampak bagi pemeliharaan

lingkungan. Prinsip tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pandangan *sustainable development* yang akhirnya diadaptasikan kedalam praktik industri pariwisata sehingga menjadi *sustainable tourism* (Ashley, 2000).

Dalam konteks penerapan program OTOP pada kegiatan produksi kain tenun *Thai-Lue*, komunitas penenun Had-Bai mempergunakan bahan dasar kain "*mak mao*". Bahan kain Mak mao tersebut merupakan plasma nuftah vegetasi dikawasan thailand utara yang tumbuh disepanjang aliran sungai mekong. Dari keuntungan produksi tenun komunitas, warga melakukan reboisasi dengan membeli tanah yang kurang produktif dan menanam lahan tersebut dengan bibit pohon Mak Mao.

- **Education atau Pembelajaran**

Dalam implementasi program OTOP prinsip pembelajaran diadaptasikan dari analisa konsep yang sudah pernah diterapkan dan tetap berupaya diperbaharui sesuai dengan kontekstual definisi kemiskinan yang berkembang khususnya di Thailand Utara. Prinsip pembelajaran tersebut diharapkan mampu mendorong pemberdayaan dan peningkatan kapasitas warga lokal terhadap aktifitas pariwisata yang mana menempatkan komunitas lokal sebagai ujung tombak penggerakannya.

Semenjak diluncurkannya program *One Tambon One Product* di wilayah Had-Bai pemerintah Thailand menyadari bahwa esensi dari kebijakan tersebut terletak pada aspek pemberdayaan komunitas lokal setempat dengan target jangka pendek yakni peningkatan kapasitas ekonomi makro wilayah Thailand Utara pasca krisis 1997. Dengan demikian OTOP merupakan

mekanisme untuk mendorong terjadinya pemberdayaan secara luas komunitas, langkah fasilitasi dan juga edukasi pada objek sasaran pembangunan yakni komunitas itu sendiri (Srisantisuk, 2015).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan *pro-poor tourism* di desa Had Bai Thailand Utara merupakan strategi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan dan tingkat ekonomi lokal komunitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut ; *participation, commercial realism, hollistic livelihoods approach, flexibilty, distribution* dan *education* dimana penerapan masing-masing prinsip tersebut di dalam analisa penulis ialah melalui skema program *One Tambon One Product* (OTOP).

Dibawah program OTOP, masyarakat Had Bai khususnya, elemen komunitas di wilayah pedesaan didorong untuk mampu mengadakan kegiatan produksi yang diperoleh dari sumber daya alam maupun kekhususan bentang alam, kerajinan, kebudayaan lokal setempat yang mampu menstimulus kegiatan ekonomi komunitas lokal.

6. DAFTAR PUSTAKA

Apostolopoulos, Y. (2005). *Reinventing the Sociology of Tourism: theoretical and Empirical Investigation*

Baohua, Zheng. (2007). *Pro-Poor Tourism: China Case Study Improving Community Participation, Promoting Countryside Tourism and Boosting Community Development, Community Development Resource*. Cambodia. Development Resource Institute (CDRI)

Caroline, Ashley, D.R. (2001). *Pro-Poor Tourism Strategies : Making Tourism Work for Poor*. Nottingham: Overseas Development Institute

Chheang, Vanarith. (2013). *Tourism and Regional Integration in South East Asia*. Japan: Intitute of Developing Economies

Chheang, Vanarith. (2013). *Tourism in Developing Country*. Manila: Asia Development Bank

Gerosa, V., (2003), *Pro-Poor growth strategies in Africa. Tourism: A viable option for Pro-Poor growth in Africa*. Uganda. Commission for Africa Economic Policy Research Center.

Goodwin, H. (2000). *Pro-poor Tourism, Opportunity for Sustainable Development*. Phnom Penh. Development and Cooperation Institute (CDRI).

Kaoru, N. (2011). *One Village One Product – Rural Development Strategy in Thailand*

Kenneth, Wood. (2005). *Pro-poor tourism as a means of Sustainable projects and perspectives*. Bolivia. World Tourism Organization College of Letters, Ritsumeikan University.

Murayama, H . (2012). *Significance of The Regional One Product Policy*

Phongpaichit, Pasuk & Baker, Chris. (2004). *Pluto Populism in Thailand*. Connecticut. Yale University

Peaty , D., & Portillo, A. (2009). *Community-based tourism in Bolivia: Development in the Uctubamba Valley, Northern Peru*. Greenwich. School of Science, Departement of earth & environmental Science.

Richards, G. and D. Hall. (2000). *The community: a sustainable concept in tourism development*. London. Tourism and Sustainable Community Development :Routledge.

Saville, Naomi (2001), *Practical Strategies For Pro-Poor Tourism : Case Study of Pro-Poor Tourism and SNV in Humla District, West Nepal*.

Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Srisantisuk, Somparat., (2015). *Pro-poor tourism policy in Thailand*. London. Department of Social Policy London School of Economics.

Tangpianpant, P.G. (2010). *Thaksin Populism and Beyond : A Study of Thaksin Pro-Poor Populist Policies in Thailand*

Thomas, Caroline. 2001. 'Poverty, Development and Hunger'. In *The Globalization of World Politics*, eds.

John Baylis, Steve Smith and Patricia
Owens.Oxford University Press.